

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU (LIST OF NEW LAWS
AND REGULATIONS) SEPTEMBER 2026

Jenis Peraturan (Types of Regulation)	Nomor (Number)	Judul	Title	
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2026				
RUU		PENGATURAN REFORMA AGRARIA	Arrangements on Agrarian Reform	
		PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN	The Third Amendment to Law Number 32 of 2002 on Broadcasting	
		PENATAAN RUANG	Spatial Planning	
PERPRES	79/2026	PERCEPATAN PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Acceleration of Governance Improvement for Tin Mining in the Bangka Belitung Islands Province	
	68/2026	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026	2026 Government Work Plan Update	
RANCANGAN PERPRES		PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PADA RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH	The Use and Utilization of Above-Ground Space and Underground Space	
PERMEN PERINDUSTRIAN	25/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAJIB	Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 11 of 2025 on Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard for Solid Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Fertilizer	
	24/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN SECARA WAJIB	Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 9 of 2025 on Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard for Tires	
PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	8 Tahun 2026	RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2026-2029	National Action Plan for Food and Nutrition for 2026–2029	
PERMEN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	7 Tahun 2026	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Synchronization and Coordination of Integrated Slum Area Management	
	6 Tahun 2026	BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	Legal Assistance within the Ministry of Infrastructure and Regional Development	
PERMEN KETENAGAKERJAAN	13/2026	PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027	Guidelines for the Distribution of Government Assistance for the 2027 Fiscal Year	
PERMEN PERDAGANGAN	24/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI	The Second Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 08/M-DAG/PER/4/2011 on the Organization and Governance of the Indonesian Economic and Trade Office in Taipei	
	23/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	The Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 24 of 2025 on Import Policy and Arrangements for Used Goods and Non-Hazardous and Non-Toxic Waste	
PERMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI	10 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI	The Amendment to Regulation of the Minister of Protection of Indonesian Migrant Workers / Head of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency Number 35 of 2025 on Capacity Building for Prospective Indonesian Migrant Workers and Indonesian Migrant Workers for Overseas Labor Market Needs	
PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	6 Tahun 2026	KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Protocol Procedures within the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions	
	5 Tahun 2026	SATU DATA BIDANG DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	One Data for Villages and Development of Disadvantaged Regions	
PERMEN HAK ASASI MANUSIA	4 Tahun 2026	JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	Records Retention Schedule of the Ministry of Human Rights	
PERMEN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	13/2026	TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Official Correspondence Rules within the Ministry of Immigration and Correctional Services	
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	23/2026	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH	Standard for Education Personnel in Early Childhood Education, Primary Education, and Secondary Education	
	22/2026	PEDOMAN PENETAPAN MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH	Guidelines for the Determination of Local Content in Early Childhood Education, Primary Education, and Secondary Education	
PERMEN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF	5 Tahun 2026	PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	General Guidelines for the Distribution of Government Assistance within the Ministry of Creative Economy / Creative Economy Agency	
PERMEN PERTANIAN	16/2026	PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN, GRATIFIKASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN	Management of Conflict of Interest, Gratification, and Public Complaints within the Scope of the Ministry of Agriculture	
PERMEN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	5 Tahun 2026	PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	Provision of Performance Allowance for Employees Appointed as Acting Officers or Daily Acting Officers within the Coordinating Ministry for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections	
PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	13/2026	PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA	Utilization of Small Islands and Surrounding Waters	
	12 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH	The Amendment to Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 88/PERMEN-KP/2020 on the Organization and Work Procedures of Senior High Fisheries Schools	
	11 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units for Marine and Fisheries Training	
	10 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units for Marine and Fisheries Extension	

	9 Tahun 2026	PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Tuition Fee Exemption for Students at Secondary Education Units and Higher Education Units within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i>	
PERMEN ESDM	11 Tahun 2026	PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA SISTEM JAMINAN KUANTITAS UNTUK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	<i>Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard for the Quantity Assurance System to Ensure Accountability and Transparency in Upstream Oil and Gas Business Activities</i>	
PERMEN KEUANGAN	67/2026	STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH PUSAT	<i>Strategy and Implementation for the Management of Central Government Cash Surpluses and Deficits</i>	
	66/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 24 of 2025 on Types and Rates of Volatile Non-Tax State Revenue Applicable to the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency</i>	
	65/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.08/2020 TENTANG LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 195/PMK.08/2020 on the Auction of Sovereign Sharia Securities in the Domestic Primary Market</i>	
PERMEN DALAM NEGERI	17/2026	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	<i>Guidelines for the Preparation of Regional Revenues and Expenditures Budgets for the 2027 Fiscal Year</i>	
KEPMEN KETENAGAKERJAAN	256/2026	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENTAH DAN GAS ALAM BIDANG MANAJEMEN TANGGAP DARURAT, KRISIS, DAN KELANGSUNGAN BISNIS	<i>Stipulation of Indonesian National Work Competency Standards in the Mining and Quarrying Category, Main Group of Crude Petroleum and Natural Gas Extraction, for the Field of Emergency Response Management, Crisis, and Business Continuity</i>	
	255/2026	PROGRAM MITRA KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	<i>Policy Partner Program within the Ministry of Manpower</i>	
	254/2026	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI BIDANG BLENDING MINYAK BUMI DAN PRODUK-PRODUKNYA SERTA TURUNANNYA	<i>Stipulation of Indonesian National Work Competency Standards in the Manufacturing Industry Category, Main Group of Coal and Refined Petroleum Products Industry, for the Field of Blending Petroleum, Its Products, and Derivatives</i>	
	252/2026	BESARAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2026	<i>Amount of Government Assistance for the Higher Education Graduate Internship Program for the 2026 Fiscal Year</i>	
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	69/2026	VERIFIKASI KONSUMEN PENGGUNA DAN VOLUME PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 200 (DUA RATUS) GROSS TONNAGE	<i>Verification of User-Consumers and Distribution Volume of Special Priced Fuel Oil for Fishing Vessels Ranging Above 30 (Thirty) Gross Tonnage up to 200 (Two Hundred) Gross Tonnage</i>	
	68/2026	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH MAKBON, SELEMKAI, MEGA DAN MORAIID KABUPATEN SORONG DAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	<i>Marine Conservation Area in the Waters of Makbon, Selemkai, Mega, and Moraid Sub-districts, Sorong Regency and Tambrau Regency, Southwest Papua Province</i>	
	67/2026	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PULAU TEON, NILA, SERUA KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU	<i>Marine Conservation Area in the Waters of Teon, Nila, and Serua Islands, Central Maluku Regency, Maluku Province</i>	
	65/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT	<i>The Amendment to Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 13 of 2026 on Planning Documents for the Management of Marine Sedimentation Products</i>	
	64/2026	KEBUTUHAN DALAM NEGERI MATERIAL HASIL SEDIMENTASI DI LAUT BERUPA PASIR LAUT TAHUN 2026	<i>Domestic Demand for Marine Sedimentation Materials in the Form of Sea Sand for the 2026 Fiscal Year</i>	
	63/2026	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN TELUK BONE KABUPATEN BONE DAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI	<i>Marine Conservation Area in the Waters of Bone Bay, Bone Regency and Sinjai Regency, South Sulawesi Province</i>	
KEPMEN KEUANGAN	66/MK/BC/2026	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Stipulation of Export Prices for the Calculation of Export Duties on Mining Products Subject to Export Duties</i>	
KEPMEN KESEHATAN	HK.01.07/MENKES/951/2026	PEDOMAN IZIN EDAR ALAT KESEHATAN BERBASIS PERANGKAT LUNAK	<i>Guidelines for the Distribution Permit of Software-Based Medical Devices</i>	
KEPMEN ESDM	364.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026	<i>Benchmark Price for Metal Mineral and Benchmark Price for Coal for the Second Period of September 2026</i>	
	363.K/MB.01/MEM.B/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 268.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMIDITAS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA	<i>The Second Amendment to Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 268.K/MB.01/MEM.B/2025 on Guidelines for Determining Benchmark Prices for the Sale of Metal Mineral Commodities and Coal</i>	
KEPMEN PERDAGANGAN	1817/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duties</i>	
KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BP2MI	1452/2026	PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KEPULANGAN DAN REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH YANG DITEMPATKAN OLEH KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>Technical Guidelines for Facilitating the Repatriation and Rehabilitation of Problematic Indonesian Migrant Workers Placed by the Ministry of Indonesian Migrant Worker Protection/Indonesian Migrant Worker Protection Agency</i>	
	1445/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 2006 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>The Amendment to Decree of the Minister of Indonesian Migrant Worker Protection/Head of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency Number 2006 of 2025 on the Designation of Work Units Responsible for Bureaucratic Reform Implementation Assessment Indicators within the Ministry of Indonesian Migrant Worker Protection/Indonesian Migrant Worker Protection Agency</i>	
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA; MENTERI KETENAGAKERJAAN; MENTERI PANRB	1205/2026; 3/2026; 2/2026	HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027	<i>National Holidays and Joint Leave for 2027</i>	
SURAT EDARAN MENTERI KOMDIGI	4 Tahun 2026	KEWAJIBAN PEMENUHAN PILIHAN LAYANAN DAN PERLINDUNGAN SISA KUOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 273/PUU-XXIII/2025	<i>Mandatory Service Option Fulfillment and Remaining Quota Protection in the Implementation of Decision of the Constitutional Court No. 273/PUU-XXIII/2025</i>	
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM	11/SE/Mn/2026	TATA CARA PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	<i>Procedures for the Execution of Special Assignments in the Framework of Accelerating Infrastructure Development</i>	
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-10/BC/2026	PENGELOLAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN	<i>Management of Unclaimed Goods, State-Controlled Goods, and State-Owned Goods at Customs Bonded Storage Facilities</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RESIKO	41/KPTS/Dt/2026	FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH	<i>Legal Administrative Format/Template for the Verification of Proposed Home Improvement Assistance Candidates</i>	
	40/KPTS/Dt/2026	PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH	<i>Technical Guidelines for the Verification of Proposed Home Improvement Assistance Candidates</i>	

	36/KPTS/Dt/2026	PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH	<i>Technical Guidelines for the Submission of Proposed Candidates for Home Improvement Assistance</i>	
	34/KPTS/Dt/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO NOMOR 23/KPTS/DT/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DANA BEDAH RUMAH	<i>The Amendment to Decree of the Director-General of Governance and Risk Management Number 23/KPTS/DT/2026 on Technical Guidelines for the Disbursement of Home Improvement Funds</i>	
	33/KPTS/Dt/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO NOMOR 19/KPTS/DT/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH	<i>The Amendment to Decree of the Director-General of Governance and Risk Management Number 19/KPTS/DT/2026 on Technical Guidelines for the Verification of Home Improvement Assistance Candidates</i>	
	32/KPTS/Dt/2026	FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM RANTAI SUPLAI BAHAN BANGUNAN	<i>Legal Administrative Format/Template for Building Material Supply Chains</i>	
	31/KPTS/Dt/2026	PETUNJUK TEKNIS RANTAI SUPLAI BAHAN BANGUNAN	<i>Technical Guidelines for Building Material Supply Chains</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 374/2026	PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT SOLAS CHAPTER II-1, CHAPTER II-2, CHAPTER V, DAN CHAPTER XIV BERDASARKAN RESOLUSI MSC.532 (107) DAN MSC.550 (108) BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA	<i>Technical Guidelines for Inspection and Oversight Related to SOLAS Chapters II-1, II-2, V, and XIV Pursuant to MSC.532 (107) and MSC.550 (108) Resolutions for Indonesian-Flagged Vessels</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	694/DJMT/SK.HK2.7/VIII/2026	PEDOMAN PENOMORAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	<i>Guidelines for Case Numbering within Administrative Courts</i>	
SE DIRJEN BINA MARGA	24/SE/Db/2026	PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA STUDI KELAYAKAN PROYEK JALAN	<i>Guidelines for the Preparation of Terms of Reference for Road Project Feasibility Studies</i>	
SE DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA	SE-DJPU 15/2026	PENANGANAN DAMPAK ABU VULKANIK TERHADAP OPERASI PENERBANGAN	<i>Management of Volcanic Ash Impacts on Flight Operations</i>	
SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 19/2026	KAMPANYE TOKYO MOU UNTUK PEMERIKSAAN TERKONSENTRASI PADA PENGAMANAN MUATAN PADA UNIT MUATAN DAN UNIT TRANSPORTASI MUATAN (CONCENTRATED INSPECTION CAMPAIGN (CIC) ON CARGO SECURING OF CARGO UNITS AND CARGO TRANSPORT UNITS)	<i>Tokyo MOU Concentrated Inspection Campaign on Cargo Securing of Cargo Units and Cargo Transport Units</i>	
SE DIRJEN KESEHATAN LANJUTAN	HK.02.02/D/7066/2026	PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT DAN PENERAPAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PADA MASA TRANSISI SETELAH DITERBITKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG RUMAH SAKIT	<i>Adjustment to Hospital Operations and Implementation of Hospital Classifications During the Transition Period Following the Issuance of Regulation of the Minister Number 6 of 2026 on Hospitals</i>	
SE DIRJEN PAJAK	SE-10/PJ/2026	PEDOMAN PENGELOLAAN ATAS BENDA SITAAN, BARANG SITAAN, JAMINAN ASET BERWUJUD, DAN DOKUMEN YANG DIPINJAM UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN	<i>Guidelines for the Management of Seized Objects, Seized Assets, Tangible Asset Collateral, and Documents Borrowed for Tax Purposes</i>	
SE DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	705/2026	PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SETEMPAT	<i>Administrative Guidelines for On-Site Inspection</i>	
PERATURAN OJK	16/2026	PENYELENGGARAAN BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS	<i>Organization of Strategic Mineral and Commodity Exchanges</i>	
	15/2026	PENAHAPAN PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN TRANSAKSI PADA BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS DARI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KE OTORITAS JASA KEUANGAN	<i>Phasing of the Transition of Duties and Authorities for the Regulation and Supervision of Transactions on Strategic Mineral and Commodity Exchanges from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency to the Financial Services Authority</i>	
	14/2026	ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN	<i>Organization, Governance, and Budget of the Financial Services Authority Supervisory Board</i>	
	13/2026	PEMEGANG SAHAM BURSA EFEK	<i>Shareholders of the Stock Exchange</i>	
	12 Tahun 2026	PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI (EBA-SP) DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	<i>Issuance and Reporting of Asset-Backed Securities in the Form of Participation Certificates (EBA-SP) for Secondary Housing Financing</i>	
	11 Tahun 2026	LAPORAN BERKALA LEMBAGA PENJAMIN	<i>Periodic Reports of Guarantee Institutions</i>	
RANCANGAN PERATURAN OJK		PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	<i>Amendment to Regulation of the Financial Services Authority Number 40 of 2024 on Information Technology-Based Co-Funding Services</i>	
		PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN	<i>The Amendment to Regulation of the Financial Services Authority Number 3 of 2024 on the Operation of Financial Sector Technology Innovation</i>	
		PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN	<i>Organization of Pension Fund Businesses</i>	
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK	9 Tahun 2026	BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN	<i>Format and Structure of Good Corporate Governance Reports for Financial Sector Technology Innovation Provider</i>	
	8 Tahun 2026	PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON	<i>Guidelines for Incidental Reporting via the Financial Services Authority Reporting System in the Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Sectors</i>	
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK		LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI	<i>Annual Actuarial Report of Insurance Companies and Reinsurance Companies</i>	
PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA	II-A	PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	<i>Trading of Equity Securities</i>	
	II-O	PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA	<i>Trading of Collective Investment Contract Infrastructure Investment Fund Units on the Exchange</i>	
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Amendment to Regulation of the Financial and Development Supervisory Agency Number 2 of 2025 on the Organization and Work Procedures of the Financial and Development Supervisory Agency</i>	
	4 Tahun 2026	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Official Document Governance within the Financial and Development Supervisory Agency</i>	
PERATURAN ARSIP NASIONAL	4 Tahun 2026	JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	<i>Positions and Position Classes within the National Archives of the Republic of Indonesia</i>	
	3 Tahun 2026	PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	<i>Business Process Map within the National Archives of the Republic of Indonesia</i>	
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK	7 Tahun 2026	KLASIFIKASI BAKU JABATAN INDONESIA	<i>Indonesian Standard Classification of Occupations</i>	
	6 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA	<i>The Amendment to Regulation of the Central Agency for Statistics Number 7 of 2025 on the Indonesia Standard Industrial Classification</i>	
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL	11 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BADAN GIZI NASIONAL	<i>Operation of the Integrated Service Center of the National Nutrition Agency</i>	

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA	4 Tahun 2026	PENETAPAN MEDIA PEMBAWA UNTUK DIKUASAI NEGARA	<i>Designation of Carrier Media to be Seized by the State</i>	
PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan	1 Tahun 2026	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Pencarian dan Pertolongan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi	<i>Competency Development of Search and Rescue Human Resources through an Integrated Learning System</i>	
PERATURAN BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	1 Tahun 2026	PEMBIAYAAN Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	<i>Housing Ownership Financing through the Housing Financing Liquidity Facility</i>	
PERATURAN ANGGOTA Dewan Gubernur BI	28/2026	PERUBAHAN KELIMA ATAS Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing	<i>The Fifth Amendment to the Regulation of the Members of the Board of Governors Number 21 of 2025 on Foreign Exchange Monetary Operations</i>	
	27/2026	KEPESERTAAN dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika	<i>Participation in the Organization of Fund Transfers, Scheduled Clearing, Transactions, Administration of Securities, and Real-Time Gross Settlement</i>	
PERATURAN KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara	9 Tahun 2026	KEMUDAHAN BERUSAHA dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara	<i>Ease of Doing Business and Investment Facilities in the Nusantara Capital City</i>	
PERATURAN Lembaga Penjamin Simpanan	2 Tahun 2026	PROGRAM Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	<i>Community and Environmental Education and Empowerment Program</i>	
	1 Tahun 2026	PEMBENTUKAN Peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan	<i>Formulation of Regulations within the Deposit Insurance Corporation</i>	
PERATURAN Ketua Ombudsman	6 Tahun 2026	PEMBERIAN Penghargaan atas Penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	<i>Granting of Awards for the Implementation Evaluation of the Government Agency Performance Accountability System within the Ombudsman of the Republic of Indonesia</i>	
	5 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN Statistik Sektoral di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	<i>Implementation of Sectoral Statistics within the Ombudsman of the Republic of Indonesia</i>	
PERATURAN KEPALA BP Batam	15/2026	TATA CARA Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberlakukan ketentuan pembatasan untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup	<i>Procedures for the Entry of Goods into the Batam Free Trade Zone and Free Port Subject to Restriction Provisions for the Protection of Consumers of Goods Distributed in the Batam Free Trade Zone and Free Port, Health, Safety, and the Environment</i>	
	14/2026	PERUBAHAN ATAS Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	<i>The Amendment to Regulation of the Head of the Batam Free Trade Zone and Free Port Free Trade Zone Authority Number 8 of 2026 on the Organization of the Entry and Release of Goods To and From the Batam Free Trade Zone and Free Port</i>	
RANCANGAN Peraturan BPOM		TATA LAKSANA PERSETUJUAN PELAKSANAAN UJI PRAKLINIK OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	<i>Procedures for the Approval of Preclinical Trial Execution for Natural Medicines, Quasi-Medicines, Health Supplements, and Cosmetics</i>	
KEPUTUSAN Ketua Mahkamah Agung	159/KMA/SK.HK2/VIII/2026	PEMBERLAKUAN Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan	<i>Enactment of Book II Guidelines on Technical Administrative and Judicial Implementation</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT BEI	Kep-00135/BEI/09-2026	PERUBAHAN KETENTUAN Pembatasan Transaksi Short Selling	<i>Amendment to the Provisions on Short Selling Transaction Restrictions</i>	
KEPUTUSAN Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	301/2026	PRODUK dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal	<i>Products and Materials Exempted from the Halal Certification Obligation</i>	
RANCANGAN Keputusan Kepala BPOM		TATA CARA PERHITUNGAN NILAI KANDUNGAN ZAT GIZI dari Bahan Pangan yang Digunakan	<i>Procedures for the Calculation of the Nutritional Content Value of Used Food Ingredients</i>	
PERIODE I BULAN SEPTEMBER 2026 (FIRST PERIOD OF SEPTEMBER 2026)				
RUU		MINYAK DAN GAS BUMI	<i>Oil and Gas</i>	
		PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	<i>Employment Protection</i>	
		PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA	<i>Asset Forfeiture Related to Criminal Offenses</i>	
		SATU DATA INDONESIA	<i>One Data Indonesia</i>	
		PENGATURAN REFORMA AGRARIA	<i>Agrarian Reform</i>	
PP	38/2026	PENGLOLAAN Badan Usaha Milik Negara	<i>Management of State-Owned Enterprises</i>	
	33/2026	PERATURAN Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	<i>Implementing Regulation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection</i>	
PERPRES	41/2026	PENGUATAN Logistik Nasional	<i>Strengthening National Logistics</i>	
RANCANGAN PERPRES		PENYEDIAAN BATUBARA DAN GAS BUMI untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum oleh Badan Layanan Umum Sektor Energi	<i>Provision of Coal and Gas for Power Generation for Public Interest by Energy Sector Public Service Agencies</i>	
INPRES	11 Tahun 2026	PENGUATAN Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<i>Strengthening Enforcement of the Prohibition on Land Clearing by Burning and Control of Forest and Land Fires</i>	
PERMEN KOPERASI	6 Tahun 2026	PEDOMAN UMUM Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi	<i>General Guidelines for the Organization of Government Assistance at the Ministry of Cooperatives</i>	
	5 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Cooperatives Number 3 of 2025 on the Implementation of Programs, Activities, and Deconcentration Budgets of the Ministry of Cooperatives</i>	
PERMEN HAK ASASI MANUSIA	3 Tahun 2026	TATA CARA Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia	<i>Procedures for Imposing Disciplinary Sanctions on Employees within the Ministry of Human Rights</i>	
	2 Tahun 2026	JABATAN dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia	<i>Positions and Position Grades within the Ministry of Human Rights</i>	
PERMEN PPMI/BP2MI	9 Tahun 2026	JAMINAN Sosial Pekerja Migran Indonesia	<i>Social Security for Indonesian Migrant Workers</i>	
PERMEN Pendidikan Dasar dan Menengah	21/2026	SISTEM Penjaminan Mutu Pendidikan	<i>Education Quality Assurance System</i>	
PERMEN KETENAGAKERJAAN	12 Tahun 2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi	<i>Third Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 8 of 2025 on Guidelines for the Provision of Government Assistance for the Higher Education Graduate Internship Program</i>	
PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	7 Tahun 2026	PELAKSANAAN Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	<i>Implementation of Regulation of the Government Number 70 of 2019 on the Planning, Organization, and Evaluation of the Respect for, Protection of, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities</i>	

PERMEN PARIWISATA	6 Tahun 2026	TATA CARA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL	<i>Procedures for Stakeholder Engagement, Monitoring and Evaluation, and Reporting on the Implementation of the National Tourism Destination Master Plan</i>	
PERMEN PEKERJAAN UMUM	17/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Public Works Number 1 of 2025 on the Organization and Work Procedures of Technical Implementing Units within the Ministry of Public Works</i>	
PERMEN SOSIAL	10 Tahun 2026	PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL	<i>Management of Conflicts of Interest within the Ministry of Social Affairs</i>	
	9 Tahun 2026	KURIKULUM PADA SEKOLAH RAKYAT	<i>Curriculum for Sekolah Rakyat</i>	
PERMEN PERTANIAN	15/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 46 of 2019 on the Development of Strategic Horticultural Commodities</i>	
PERMEN PANRB	16/2026	JABATAN FUNGSIONAL PENATA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	<i>Functional Position of Witness and Victim Protection Officer</i>	
PERMEN HUKUM	14/2026	TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	<i>Procedures for the Announcement of Limited Liability Companies in the Official Gazette of the Republic of Indonesia and Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia, and the Announcement Foundations in the Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia</i>	
	12 Tahun 2026	MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN HUKUM	<i>Career Management for Civil Servants of the Ministry of Law</i>	
	9 Tahun 2026	KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM	<i>Technical Competency Dictionary for Government Affairs in the Field of Law</i>	
PERMEN KEUANGAN	64/2026	PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	<i>Technical Guidelines for Accounting for Non-Tax State Revenue from Upstream Oil and Gas Business Activities</i>	
	63/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 98 of 2024 on the Types and Tariffs of Volatile Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency</i>	
	62/2026	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA	<i>Types and Tariffs of Volatile Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Tourism</i>	
	59/2026	PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA DALAM VALUTA ASING YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DI PASAR PERDANA DOMESTIK TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Government-Borne Income Tax on Interest or Returns on Foreign Currency-Denominated Government Securities Issued by the Government in the Domestic Primary Market for the 2026 Fiscal Year</i>	
	55/2026	KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK	<i>Tax Consultants and Other Parties Acting as Taxpayer Representatives</i>	
KEPMEN PERDAGANGAN	1778/2026	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG	<i>List of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein Brands in Branded Packaging and Packaged with Net Weight Less Than or Equal to 25 Kg</i>	
	1777/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty and Public Service Agency Service Tariffs</i>	
	1776/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duty</i>	
KEPMEN ESDM	351.K/MB.01/MEM.B/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 54.K/MB.01/MEM.B/2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	<i>Amendment to Decree of the Minister No. 54.K/MB.01/MEM.B/2024 on Guidelines for the Implementation of Investigation and Research Assignments for the Preparation of Mining Areas, Mining Business License Areas, and Special Mining Business License Areas</i>	
	348.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026	<i>Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the First Period of September 2026</i>	
	342.K/GL.01/MEM.G/2026	PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL TUNGAGUNG	<i>Designation of the Tulungagung National Geopark</i>	
	323.K/MB.01/MEM.B/2026	PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Guidelines for the Submission, Evaluation, and Approval of Coal Blending Applications in Mineral and Coal Mining Business Activities</i>	
	306.K/GL.01/MEM.G/2026	PENETAPAN KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH	<i>Designation of the Klaten Regency Geological Heritage Area, Central Java Province</i>	
	304.K/GL.01/MEM.G/2026	PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BLITAR	<i>Designation of the Blitar Karst Landscape Area</i>	
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	62/2026	RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712	<i>Fisheries Management Plan for Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia 712</i>	
	60/2026	PEDOMAN PENGHITUNGAN KONSUMSI IKAN MASYARAKAT	<i>Guidelines for the Calculation of Community Fish Consumption</i>	
KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	KEP.71/M.PPN/HK/08/2026	PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2026	<i>Designation of Priority Data for 2026</i>	
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI	1 Tahun 2026	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DALAM KONDISI RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	<i>Prevention and Control of Forest and Land Fires and Prohibition of Land Clearing by Burning under Forest and Land Fire Risk Conditions</i>	
SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS	2 Tahun 2026	PEDOMAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN	<i>Guidelines for the Implementation of Directive of the President of the Republic of Indonesia Number 2 of 2025 on the Acceleration of the Development, Improvement, Rehabilitation, and Operation and Maintenance of Irrigation Networks to Support Food Self-Sufficiency</i>	
SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BAPEDAL	17 Tahun 2026	UPAYA STRATEGIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAMPAK ASAP KEBAKARAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA	<i>Strategic Measures for the Protection of Communities Affected by Land Fire Smoke Based on the Air Pollution Standard Index</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK	KEP-185/PJ/2026	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026	<i>Tax Administration Policy in Connection with Natural Disasters in the Province of East Nusa Tenggara in 2026</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 372/2026	PELAKSANAAN KAMPANYE PEMERIKSAAN TERKONSENTRASI (CONCENTRATED INSPECTION CAMPAIGN (CIC)) TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KESELAMATAN KEBAKARAN PADA KAPAL PENUMPANG DAN KAPAL PENUMPANG RO-RO BERBENDERA INDONESIA	<i>Implementation of the Concentrated Inspection Campaign (CIC) on Compliance with Fire Safety Requirements for Indonesian-Flagged Passenger Ships and Ro-Ro Passenger Ships</i>	
SURAT EDARAN DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PPE.3011.PP.05 Tahun 2026	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	<i>Guidelines for the Implementation of Announcements of Limited Liability Companies in the Official Gazette of the Republic of Indonesia and Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia, and Announcements of Foundations in the Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia</i>	
SURAT EDARAN DIRJEN BINA MARGA	23/SE/Db/2026	PEDOMAN KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN JALAN, JEMBATAN, DAN TEROWONGAN	<i>Guidelines on Criteria and Benchmarks for Assessing the Failure of Road, Bridge, and Tunnel Structures</i>	

	21/SE/Db/2026	PEDOMAN PERHITUNGAN ESTIMASI BIAYA PEMULIHAN INFRASTRUKTUR PADA JALAN NASIONAL DENGAN PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN SISTEM WEIGH-IN-MOTION	<i>Guidelines on Criteria and Benchmarks for Assessing the Failure of Road, Bridge, and Tunnel Structures</i>	
	19/SE/Db/2026	PEDOMAN PENGUMPULAN DATA BEBAN SUMBU KENDARAAN DAN INSTALASI, KALIBRASI, VALIDASI, DAN OPERASIONAL SISTEM WEIGH IN MOTION PERKERASAN JALAN	<i>Guidelines for the Collection of Vehicle Axle Load Data and the Installation, Calibration, Validation, and Operation of the Weigh-in-Motion System for Road Pavements</i>	
	18/SE/Db/2026	PEDOMAN PENGUJIAN PASCAPELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN JALAN DAN BETON STRUKTUR	<i>Guidelines for Post-Implementation Testing of Road Pavement and Structural Concrete Construction Works</i>	
	17/SE/Db/2026	MANUAL MANAJEMEN PROYEK (MMP) KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PEMBANGUNAN FLYOVER PANORAMA I (SITINJAU LAUIK I) DI PROVINSI SUMATERA BARAT	<i>Project Management Manual (PMM) for Public Private Partnership (KPBU) for the Construction of the Panorama I Flyover (Sitinjau Lauik I) in West Sumatra Province</i>	
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK	SE-6/PJ/2026	PETIJNJK PELAKSANAAN PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK	<i>Guidelines for Handling Appeals and Lawsuits before the Tax Court</i>	
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	3 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	<i>Organization and Work Procedures of the National Counter-Terrorism Agency</i>	
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	2 Tahun 2026	KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	<i>Electronic Catalog in the Procurement of Government Goods and/or Services</i>	
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR	26/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL	<i>Second Amendment to Regulation of the Members of the Board of Governors Number 27 of 2025 on the Implementing Regulation of the Macroprudential Liquidity Incentive Policy</i>	
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15/2026	PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	<i>Revocation of the Indonesian Food and Drug Authority Number 10 of 2020 on the Implementation of the Performance Management System for Civil Servants within the Indonesian Food and Drug Authority</i>	
	14/2026	PEDOMAN UJI TOKSISITAS PRAKLINIK SECARA IN VIVO	<i>Guidelines for In Vivo Preclinical Toxicity Testing</i>	
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	7 Tahun 2026	PENGLOLAAN ARSIP ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	<i>Electronic Records Management within the National Research and Innovation Agency</i>	
	6 Tahun 2026	PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	<i>Acting Officials and Acting Daily Officials within the National Research and Innovation Agency</i>	
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI	17/2026	PERUBAHAN KEDUAPULUHTIGA ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Twenty-Third Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education Number 13 of 2024 on the Regulation of Study Programs Covered by Independent Accreditation Agencies</i>	
	16/2026	KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA	<i>Criteria Exceeding the National Higher Education Standards for Study Programs Covered by the Independent Accreditation Agency for Tourism</i>	
	15/2026	PERUBAHAN KEDUAPULUHdua ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Twenty-Second Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education Number 13 of 2024 on the Regulation of Study Programs Covered by Independent Accreditation Agencies</i>	
	14/2026	PERUBAHAN KEDUAPULUHSATU ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Twenty-First Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education Number 13 of 2024 on the Regulation of Study Programs Covered by Independent Accreditation Agencies</i>	
	13/2026	KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEAGAMAAN	<i>Criteria Exceeding the National Higher Education Standards for Study Programs Covered by Independent Accreditation Agencies for Religious Studies</i>	
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI	<i>Investment-Linked Insurance Products</i>	
		TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA Pensiun	<i>Good Corporate Governance for Insurance Companies, Guarantee Institutions, and Pension Funds</i>	
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN		PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH	<i>Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines for Sharia Rural Banks</i>	
		PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI	<i>Guidelines for the Implementation of Risk Management and Assessment of the Soundness Level of Investment Managers</i>	
		PENENTUAN STANDAR DEVIASI ATAS HARGA PASAR WAJAR EFEK OLEH LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK	<i>Determination of the Standard Deviation of Fair Market Prices of Securities by the Securities Pricing Agency</i>	
PEDOMAN TATA KERJA SKK MIGAS	PTK- 023/SKKIA0000/2026/S9	PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI (REVISI-01)	<i>Implementation of Cooperation in the Management of Portions of Working Areas for Increasing Oil and Natural Gas Production (Revision-01)</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT BEI	Kep-00125/BEI/09-2026	KEBIJAKAN BIAYA DAN INSENTIF BAGI LIQUIDITY PROVIDER SAHAM	<i>Fee and Incentive Policy for Equity Liquidity Providers</i>	
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	15.S/2026	PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Provision of Compensation to Service Recipients Where Services Fail to Meet Service Standards within the Deputy for Investment Implementation Control</i>	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL	356/2026	STANDAR MUTU PANGAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	<i>Food Quality Standards for the Organziation of Government Food Reserves</i>	
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	7 Tahun 2026	PEMBINAAN PENERAPAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH	<i>Guidances on the Implementation of Civil Service Management in Government Agencies</i>	